

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Kebijakan luar negeri merupakan salah satu isu penting dalam hubungan internasional. Kebijakan luar negeri atau juga dikenal sebagai politik luar negeri merupakan salah satu alat penting bagi negara dalam menjalankan tata kelola negara, khususnya dalam menjalin hubungan dengan negara lain. Kebijakan luar negeri dapat dikatakan sebagai strategi yang digunakan negara untuk merepresentasikan negaranya dalam dunia internasional. Dalam mengambil suatu kebijakan luar negeri, negara akan sangat berhati-hati dan selalu mempertimbangkan banyak hal, baik secara domestik maupun eksternal. Tidak jarang kebijakan suatu negara dipertanyakan oleh aktor di sekitarnya, hal tersebut dikarenakan setiap negara memiliki persepsinya masing-masing. Untuk itu penelitian ini melihat lebih lanjut dan menganalisis terkait kebijakan Kazakhstan mengundang Rusia dalam konflik internal yang terjadi di negaranya.

Kazakhstan merupakan negara terbesar kedua setelah Rusia sebagai negara pecahan Uni Soviet. Layaknya dua saudara, hubungan Kazakhstan dan Rusia masih terjalin baik sampai sekarang. Hal ini bisa dilihat dari keterlibatan keduanya dalam sebuah organisasi yang dibentuk pada tahun 1992, yaitu *Collective Security Treaty Organization (CSTO)*. CSTO merupakan organisasi keamanan kolektif dalam lingkup regional yang mewadahi kerjasama negara anggotanya dalam bidang militer dan politik. CSTO juga dikenal sebagai aliansi

militer yang menaungi enam negara bekas Uni Soviet, yaitu Rusia, Kazakhstan, Armenia, Belarus, Kirgistan dan Tajikistan (CSTO, 2022).

Pada 2 Januari 2022 salah satu negara anggota CSTO yaitu Kazakhstan dilanda konflik internal yang kemudian menjadikan negara tersebut berada pada status darurat secara nasional. Konflik yang terjadi di Kazakhstan berawal dari aksi protes masyarakat terkait kenaikan harga bahan bakar, kemudian aksi protes ini terus meluas dan semakin tidak terkendali. Pemerintah Kazakhstan menilai bahwa aksi ini di luar batas kewajaran, karena tidak hanya sekadar aksi demonstrasi rakyat, tapi sudah mengarah kepada tindakan kudeta dan kondisi ini dinilai juga turut dimanfaatkan oleh teroris untuk mengacaukan kondisi negara. Kemudian pada 5 Januari 2022, mengingat kondisi yang semakin tidak terkendali, melalui berita yang disiarkan di stasiun televisi nasional (*Habar-24 TV Channel*) Presiden Kassym Jomart Tokayev menyatakan bahwa ia telah meminta bantuan kepada *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) yang dipimpin oleh Rusia (TASS, 2022d).

Merespons permintaan dari Presiden Tokayev, pada 6 Januari 2022 CSTO mengirimkan Pasukan Penjaga Perdamaian untuk jangka waktu terbatas dalam rangka menstabilkan dan menormalkan situasi di Kazakhstan (CSTO, 2022). Kemudian diperjelas melalui data dari Kementerian Pertahanan Kazakhstan, bahwa CSTO mengirim 2030 tentara dan 200 unit peralatan militer untuk melindungi fasilitas vital negara, militer dan sosial (Ministry of Defense, 2022). Hal ini merupakan sejarah baru bagi CSTO, dimana untuk pertama kalinya CSTO mengirim pasukan penjaga perdamaian ke wilayah konflik. Tindakan CSTO untuk

mengirim Pasukan Penjaga Perdamaian, sejalan dengan mandat dari *article 4 Collective Security Treaty 1992* dikutip langsung dari situs resmi CSTO, yaitu:

“Jika salah satu Negara Anggota mengalami agresi (serangan bersenjata yang mengancam keselamatan, stabilitas keutuhan wilayah, dan kedaulatan), hal itu akan dianggap oleh negara anggota sebagai agresi terhadap semua negara anggota dari traktat ini” (CSTO, 2012).

Setelah sepekan bertugas, misi Pasukan Penjaga Perdamaian dinyatakan selesai dan akan ditarik secara bertahap. Dimulai dari 13 Januari 2022 bertempat di lapangan Institut Militer Angkatan Darat, dilaksanakan pelepasan Pasukan Penjaga Perdamaian. Pelepasan ini dihadiri oleh Sekretaris Jenderal CSTO, Wakil Menteri Pertahanan Kazakhstan dan Walikota Almaty (Ministry of Defense, 2022). Selanjutnya, pada 19 Januari 2022 seluruh Pasukan Penjaga Perdamaian sudah meninggalkan Kazakhstan, hal ini disampaikan oleh Kepala Departemen Kerjasama Internasional Kementerian Pertahanan Kazakhstan melalui *Central Communication Service* (JJ-TV, 2022).

Untuk memutuskan suatu kebijakan setiap negara memiliki pertimbangan dan persepsi masing-masing, begitupun dengan Kazakhstan. Kebijakan Kazakhstan untuk melibatkan negara lain dalam konflik internalnya menjadi suatu fenomena internasional yang sangat menarik untuk diteliti lebih lanjut. Oleh karena itu, penelitian ini akan menganalisis alasan atau faktor yang mendasari kebijakan Kazakhstan mengundang Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik internal negaranya menggunakan perspektif konstruktivisme berbasis identitas. Penelitian ini tergolong penelitian yang baru, karena sejauh riset yang dilakukan belum ada peneliti yang berusaha meneliti kasus tersebut.

1.2 Perumusan Masalah

Rumusan masalah dari penelitian ini adalah “Mengapa Kazakhstan mengundang Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik internal yang terjadi di negaranya?”

1.3 Tujuan Penelitian

1.3.1 Tujuan Umum

Penelitian ini secara umum bertujuan untuk mengetahui permasalahan yang terjadi di Kazakhstan dan menjelaskan kebijakan luar negeri Kazakhstan dalam merespon konflik internal yang terjadi di negaranya.

1.3.2 Tujuan Khusus

Penelitian ini secara khusus bertujuan untuk menjelaskan alasan dan faktor yang mempengaruhi kebijakan Kazakhstan mengundang Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik internal di negaranya.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi dan bermanfaat secara akademis dan praktis khususnya dalam bidang ilmu Hubungan Internasional. Secara akademis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam terkait teori konstruktivis berbasis identitas dan penerapannya dalam kasus yang diangkat. Penelitian ini juga memperdalam pengetahuan terkait identitas, yaitu pandangan bahwa identitas merupakan salah satu pegangan utama bagi negara dalam kehidupan politiknya, khususnya dalam memutuskan kebijakan luar negeri. Hal ini dapat dilihat dari analisis konflik internal yang terjadi di

Kazakhstan, dimana identitas yang terbentuk antara Rusia dan Kazakhstan menjadi faktor utama yang mempengaruhi kebijakan Kazakhstan untuk mengundang Rusia.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan terkait kebijakan luar negeri Kazakhstan, khususnya kebijakan Kazakhstan terhadap Rusia dalam konflik internal di negaranya. Penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi pertimbangan bagi pemerintah dalam mengambil kebijakan di bidang Hubungan Internasional, khususnya terkait identitas nasional.

1.5 Kerangka Pemikiran Teoritis

Pada tulisan ini, penulis menggunakan teori konstruktivis berbasis identitas yang merupakan salah satu aliran penting dari paradigma konstruktivis. Konstruktivis mulai muncul sebagai teori pembelajaran kontemporer pada tahun 1980-an dengan tokohnya yang terkenal, yaitu Nicholas Onuf. Konstruktivis hadir sebagai salah satu perspektif dalam hubungan internasional yang berusaha melengkapi, bahkan mengkritik teori-teori sebelumnya.

Terlepas dari segala kekurangannya, konstruktivis sudah menjadi paradigma yang cukup mapan untuk melihat dan memahami fenomena politik yang terjadi. Konstruktivis berusaha untuk menjelaskan setiap fenomena dengan berfokus pada gagasan yang bagi sebagian perspektif dinilai tidak penting. Mengutip dari buku yang berjudul “ *The Power of Ideas: Konstruktivisme dalam Hubungan Internasional*”, karya Mohamad Rosyidin (2015), bahwa berdasarkan pemikiran Herbert Blumer (1900-1987) terdapat tiga asumsi dasar dari teori

interaksionisme simbolik, yaitu setiap tindakan yang dilakukan aktor adalah dari bagaimana aktor tersebut memaknainya, kemudian pemaknaan tersebut tercipta dari interaksi sosial yang menghasilkan kesepakatan bersama, terakhir pemaknaan dapat berubah seiring waktu sesuai dengan perubahan interpretasinya. Dalam proses perkembangannya, konstruktivis menjadi paradigma yang menaungi beberapa aliran, yaitu konstruktivis berbasis identitas, konstruktivis berbasis norma dan konstruktivis berbasis linguistik. Dalam pandangan konstruktivis, unsur identitas, norma dan linguistik memiliki peran yang besar dalam mempengaruhi dan membentuk perilaku negara (Rosyidin, 2015).

Konstruktivis merupakan perspektif yang sangat optimis dalam mendefinisikan konsep dunia anarki, berbeda dengan realis yang memandang bahwa anarki terkait dengan hal yang konfliktual dan terjadi begitu saja. Sebagai sebuah fakta sosial anarki dimaknai sebagai konsep yang dinamis, dimana perubahan bergantung pada bagaimana aktor memaknainya (Rosyidin, 2015). Seperti yang dikatakan oleh Alexander Wendt, "*Anarchy is what state makes of it*", bahwa anarki adalah apa yang diciptakan oleh negara (Wendt, 1992). Kemudian Wendt juga menyampaikan tiga logika anarki, yaitu Hobbesian, Lockean dan Kantian. Logika Hobbesian adalah cerminan dari perspektif realis, dimana negara lain dipandang sebagai musuh yang mengancam kehidupan, sehingga hanya ada dua pilihan, yaitu membunuh atau dibunuh. Selanjutnya logika Lockean, dimana permusuhan mulai bergeser menjadi persaingan. Logika ini menerima konsep kedaulatan, dimana kedaulatan hadir untuk membatasi perilaku negara agar tidak saling membunuh. Sehingga dalam kondisi konflik

negara akan tetap bertindak dalam batasan kedaulatan dan meminimalisir penggunaan kekerasan. Terakhir logika Kantian, konsep yang mendasari logika ini adalah konsep pertemanan, dimana konflik harus diselesaikan dengan negosiasi atau tanpa perang. Melalui logika pertemanan maka akan hadir keamanan kolektif, yaitu ancaman terhadap satu anggota akan dipandang sebagai ancaman bersama, sehingga setiap anggota didorong untuk saling membantu dalam menghadapi setiap ancaman (Wendt, 1999a).

Berlandaskan pada argumen yang disampaikan oleh Alexander Wendt yang dikutip dari tulisan Guzzini dan Anna Leander, bahwa konstruktivisme menjadi teori yang berbeda dari teori lain. Perbedaan ini dapat dijelaskan dalam 3 elemen, yaitu pertama bahwa ide, norma dan nilai yang diadopsi oleh aktor internasional dapat menuntun politik internasional. Kedua, struktur ideasional tidak hanya memberikan efek regulatif kepada aktor internasional. tapi juga efek konstitutif. Maksudnya melalui struktur ideasional membangun aktor dalam mendefinisikan dirinya, kepentingannya, dan peran yang dijalankan dalam berinteraksi dengan aktor lain. Ketiga, antara struktur dan aktor akan saling membentuk dan menentukan satu sama lain. Maksudnya adalah, ketika struktur ideasional membentuk kepentingan dan identitas, maka di sisi lain aktor juga berperan dalam membentuk struktur (Guzzini, 2006: 3).

Identitas merupakan konsep yang penting dalam konstruktivisme, karena berkaitan dengan bagaimana negara mendefinisikan dirinya dan mendefinisikan negara lain (sebagai teman atau musuh). Alexander Wendt membagi identitas menjadi empat, yaitu identitas personal, identitas tipe, identitas peran, dan

identitas kolektif (Rosyidin, 2015). Dari keempat identitas tersebut, penulis akan memfokuskan untuk menganalisis studi kasus menggunakan identitas kolektif, yaitu berkaitan dengan pemikiran dan perasaan yang sama antar aktor internasional, aktor yang dimaksud disini adalah negara.

Konstruktivis memandang bahwa bukti terinternalisasinya budaya adalah identifikasi diri dengan baik yang dilakukan oleh setiap aktor dengan budaya tersebut, dimana hal tersebut menjadi cara untuk memahami jati diri mereka. Setelah melakukan identifikasi diri, maka para aktor akan merasa menjadi bagian dari suatu kelompok tertentu atas persamaan yang ada dan kemudian akan meningkatkan keinginan mereka untuk menjaga budaya kelompoknya. Terkait dengan batasan identitas kolektif, pertama dijelaskan bahwa identitas kolektif adalah hubungan yang spesifik. Kedua, cakupan dan implikasi perilaku dari identitas kolektif bergantung pada tujuan pembentukannya, yaitu terkait isu dan ancaman yang spesifik. Ketiga, suatu hubungan dan isu yang dinaungi identitas kolektif, tidak jarang berbenturan dengan identitas egoistik. Kemudian terkait dengan struktur budaya yang terinternalisasi juga dapat berubah, sehingga juga dapat mempengaruhi identitas kolektif (Wendt, 1999: 337–338).

Melalui identitas kolektif, suatu negara akan mendefinisikan negara lain sebagai teman yang berdasarkan atas kesamaan di antara keduanya, kemudian dari kesamaan tersebut akan muncul rasa solidaritas. Dimana dalam hal ini negara akan bertindak sebagai teman yang baik, yang tidak akan mengutamakan kepentingan pribadi dalam bertindak dan adanya rasa saling percaya. Sebagaimana disebutkan oleh Mohamad Rosyidin dalam tulisannya, bahwa

identitas kolektif menjadi perekat bagi negara-negara dalam menjalin hubungan, sehingga menciptakan “*sense of community*”, dimana dalam kondisi ini tidak akan ada kecurigaan antara satu negara terhadap negara lain (Rosyidin, 2015: 58).

Terdapat tiga faktor determinan yang membangun identitas kolektif yang disebutkan oleh Alexander Wendt. Pertama faktor struktural, yang menjelaskan bahwa identitas kolektif dibangun atas persepsi pertemanan. Kedua faktor sistemik, faktor yang erat kaitannya dengan hubungan yang terjalin di antara negara-negara. Dimana hubungan tersebut menjadikan kedua negara memiliki ketergantungan dan kesamaan nilai satu sama lain. Ketiga faktor strategis, dimana sikap negara terhadap negara lain yang akan membangun identitas kolektif, tentunya sikap yang baik, kooperatif, dan ramah akan mendorong negara-negara menciptakan persepsi yang positif satu sama lainnya (Rosyidin, 2015: 59–60).

Identitas kolektif juga dapat dipahami sebagai kebutuhan yang esensial, hal ini didasarkan atas argumen Wendt, bahwa ada beberapa kebutuhan yang harus dimiliki negara, yaitu, kebutuhan untuk keberlangsungan hidupnya, kebutuhan otonomi, kebutuhan akan kesejahteraan otonomi dan kebutuhan akan identitas kolektif. Kebutuhan akan identitas kolektif dimaknai sebagai kebutuhan negara akan suatu kelompok untuk merasa baik tentang dirinya sendiri (Guzzini, 2006: 10). Jadi dapat dipahami bahwa identitas kolektif berperan dalam membantu negara mendefinisikan dirinya dan mendefinisikan negara lain.

Hal tersebut sejalan dengan penjelasan Wendt dan Friedheim terkait imperium informal pasca perang, yaitu Amerika Serikat, Uni Soviet dan Prancis, dimana ketiganya tidak hanya dibangun atas unsur material, tetapi juga

melibatkan struktur otoritas intersubjektif. Proses itu dapat berupa intervensi negara lemah oleh negara kuat, yang kemudian memberikan kekuasaan bagi negara kuat untuk mengendalikan dan memberikan jaminan keamanan bagi negara lemah. Selanjutnya akan tercipta identitas yang menjadikan setiap negara bergantung dan mengidentifikasi patron mereka. Kemudian untuk mewujudkan identitas yang diyakini secara bersama akan terbentuk ideologi dan organisasi formal (Weber and Biersteker, 1996: 248).

Terkait dengan kebijakan suatu negara, Nicholas Onuf menjelaskan bahwa agen memiliki pilihan dalam bertindak, yaitu agen bisa memilih patuh terhadap suatu aturan atau melanggarnya. Namun, setiap pilihan akan ada konsekuensinya, sehingga agen diberikan kesempatan untuk membuat pilihan rasional, yaitu pilihan yang sejalan dengan tujuan dan ada jaminan bahwa pilihan tersebut merupakan pilihan yang terbaik (Onuf, 2013).

1.6 Operasionalisasi Konsep

1.6.1 Definisi Konseptual

1. Identitas

Para sarjana konstruktivis mendefinisikan identitas sebagai proses konstruksi sosial, terkait dengan pilihan agen untuk sendiri (Onuf, 2013). Identitas dapat didefinisikan sebagai ciri atau karakter yang terdapat pada suatu aktor yang kemudian dapat menjadi pembeda dengan aktor lain. Identitas dapat dipahami melalui dua konsep, yaitu identitas sebagai kategori sosial dan identitas sebagai kategori personal. Berdasarkan kategori sosial identitas berarti suatu ciri atau karakter yang kemudian

menjadi pembeda dengan yang lain. Melalui kategori sosial dapat dipahami bahwa identitas dibangun dari interaksi satu sama lain, sehingga identitas ini bisa berubah sejalan dengan proses interaksinya. Kemudian Identitas sebagai kategori personal, yaitu suatu ciri atau karakter yang sudah menyatu dengan aktor atau sudah ada sejak awal dan identitas tersebut tidak memerlukan proses pembedaan. Jadi dapat dipahami bahwa identitas ini tidak melalui proses interaksi, karena sudah disadari secara personal (Rosyidin, 2015: 46–47).

2. Kebijakan Luar Negeri

Kebijakan luar negeri tergabung dari beberapa aspek, yaitu tindakan, pernyataan, dan nilai yang berkaitan tentang bagaimana aktor ingin mencapai tujuan utamanya dan untuk membentuk dunia luar. Kebijakan luar negeri dapat dirumuskan dalam dua hal, yaitu pertama *inside looking out*, dimana peran eksternal akan menentukan karakter internal negara dan *outside looking in*, dimana konstitusional negara adalah primordial dan berdampak pada hubungan internasional. Kebijakan luar negeri hadir sebagai mitigasi terkait dampak eksternal pada domestik yang muncul dari hubungan internasional dan untuk menemukan cara memproyeksikan beberapa kekhawatiran negara terkait dunia yang anarki (Hill, 2016).

3. Sejarah

Sejarah adalah segala sesuatu yang terjadi di masa lalu. Sejarah berkaitan dengan apa yang terjadi atau dialami, tindakan, upaya politik,

organisasi ekonomi, kelompok sosial, gagasan, dan baik buruknya situasi di masa lalu. Sejarah sangat penting bagi keberlangsungan suatu negara, karena sejarah merupakan landasan untuk bertindak. Sehingga tanpa adanya sejarah masyarakat akan hilang, karena tidak ada akar sosialnya dan tidak ada budaya serta sejarahnya (Shafer, 1960).

1.6.2 Definisi Operasional

1. Identitas

Identitas yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah identitas kolektif Kazakhstan dan Rusia. Sebagai negara yang merdeka identitas merupakan hal yang sangat penting, dimana identitas menjadi karakteristik yang melekat pada suatu negara dan menjadikan negara tersebut dikenal oleh negara lain. Identitas juga menjadi pertimbangan bagi negara dalam menentukan arah kebijakannya. Hubungan dan kerjasama yang terjadi antarnegara juga didasarkan pada identitas masing-masing negara. Identitas juga akan menentukan baik atau buruknya hubungan antar negara negara, dikarenakan identitas akan sangat mempengaruhi persepsi masing-masing negara.

Penelitian ini akan berfokus dalam membahas identitas kolektif, khususnya sejarah dan budaya (bahasa, etnis, agama). Kazakhstan dan Rusia merupakan negara yang tumbuh dan berkembang dalam sejarah yang sama, dimana hal tersebut juga berpengaruh terhadap identitas masing-masing negara. Identitas, khususnya dalam hal sejarah dan budaya menjadikan Kazakhstan dan Rusia layaknya saudara, hal tersebut dapat

dilihat dari hubungan baik yang terjalin sejak lama antara Kazakhstan dan Rusia. Kedua negara ini selalu mengedepankan solidaritas dan kepercayaan dalam menjalin hubungan. Hal ini dapat dilihat dari Kebijakan Kazakhstan mengundang Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik internalnya. Kebijakan tersebut dapat dilihat sebagai bentuk kepercayaan Kazakhstan terhadap Rusia serta dapat diidentifikasi bahwa kebijakan Kazakhstan didasarkan pada identitas kolektif yang ada di antara Kazakhstan dan Rusia. Untuk itu penelitian ini berfokus untuk melihat bagaimana identitas kolektif mempengaruhi kebijakan luar negeri Kazakhstan.

2. Kebijakan Luar Negeri

Penelitian ini berfokus pada kebijakan Kazakhstan mengundang Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik internalnya. Dalam kebijakan ini Presiden Kassym Jomart Tokayev memutuskan meminta bantuan kepada organisasi keamanan pimpinan Rusia, yaitu *Collective Security Treaty Organization* (CSTO) pada tanggal 5 Januari 2022. Permintaan bantuan yang disampaikan oleh Presiden Kazakhstan tersebut dapat dipahami sebagai kebijakan luar negeri yang diambil oleh Kazakhstan sebagai upaya menyelesaikan konflik atau aksi protes masyarakat yang terjadi di Kazakhstan

3. Sejarah

Sejarah akan menjadi salah satu pembahasan utama dalam penelitian ini. Sejarah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah

sejarah negara Kazakhstan. Dalam penelitian ini sejarah yang dimiliki Kazakhstan menjadi salah satu unsur yang kemudian membentuk identitas Kazakhstan saat ini. Sejarah memainkan peran penting dalam membentuk dan mempengaruhi persepsi Kazakhstan. Sejarah juga menjadikan Kazakhstan sebagai negara yang tumbuh dan berkembang dengan identitas dan budaya yang unik. Oleh karena itu, penelitian ini membahas sejarah Kazakhstan dari masa ke masa serta memahami bagaimana sejarah dan budaya secara bersamaan memainkan peran penting dalam membangun Kazakhstan sebagai negara yang merdeka dan berdaulat.

1.7 Argumen Penelitian

Kebijakan Kazakhstan mengundang Rusia untuk membantu menyelesaikan konflik internalnya menjadi bukti bahwa identitas mampu mengarahkan kebijakan luar negeri suatu negara. Kebijakan Kazakhstan didasari oleh logika anarki Kantian, dimana pertemanan menjadi landasan utama dalam menjalin hubungan dan identitas hadir untuk mendorong terciptanya kerjasama.

Jika dilihat dari kasus tersebut identitas yang dimaksud adalah identitas kolektif, dimana identitas kolektif terbentuk dari faktor sejarah kedua negara yang merupakan negara bagian Uni Soviet, budaya (etnis, bahasa, dan agama) serta kerjasama yang terjalin di antara kedua negara. Identitas sebagai negara sekuler dan sebagai dua negara yang berbatasan secara langsung juga mendorong terciptanya hubungan baik antara Kazakhstan dan Rusia.

1.8 Metode Penelitian

Penelitian kualitatif berkaitan dengan beberapa hal, yaitu makna, konsep, definisi, karakteristik, metafora simbol dan deskripsi dari banyak hal (Lune dan Berge, 2017). Penelitian kualitatif dapat dipahami sebagai penelitian yang berusaha menjelaskan suatu fenomena yang terjadi, baik perilaku, tindakan, motivasi, dan perspektif yang dapat dideskripsikan secara holistik dan ilmiah dalam bentuk kata-kata (Moleong, 2018). Penelitian kualitatif mencakup serangkaian teknik interpretatif yang mencoba menggambarkan, menguraikan, menerjemahkan dan memahami makna fenomena sosial yang terjadi (Maanen, 1979).

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yang berusaha menjelaskan dan menganalisis faktor yang mendasari kebijakan Kazakhstan menggunakan teori konstruktivis berbasis identitas. Untuk itu penelitian ini akan menganalisis secara mendalam terkait studi kasus, sehingga akan ditemukan korelasi antara identitas dan kebijakan Kazakhstan dalam konflik internal negaranya.

1.8.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini bersifat eksplanatif, yaitu penelitian yang berusaha menjelaskan mengapa suatu fenomena terjadi. Penelitian eksplanatif merupakan salah satu metode penelitian yang berusaha menjelaskan setiap variabel yang ada, kemudian juga akan dijelaskan bagaimana pengaruh variabel satu terhadap variabel lainnya (Sugiyono, 2017). Untuk itu penelitian ini akan menjawab pertanyaan dengan menjelaskan alasan mengapa Kazakhstan meminta bantuan kepada Rusia untuk menyelesaikan konflik internal di negaranya.

1.8.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif adalah data-data yang berbentuk tulisan, simbol ataupun gambar yang didapatkan dari berbagai sumber dan menggambarkan fenomena yang terjadi. Penelitian kualitatif

1.8.3 Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumbernya, melalui observasi, wawancara atau survei. Sedangkan data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari sumbernya. Data Sekunder merupakan data yang terdapat dalam publikasi dan informasi yang telah dikeluarkan suatu organisasi (Ruslan, 2013). Data sekunder yang berbentuk tulisan, simbol, gambar ataupun video yang didapatkan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, portal berita, dan sumber-sumber yang diyakini relevan dan bisa membantu melengkapi penelitian ini.

1.8.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik *desk research* atau studi kepustakaan, yaitu dengan menggali dan mengumpulkan data-data sekunder melalui berbagai sumber seperti buku, jurnal, ensiklopedia dan dokumen lain yang relevan dengan topik penelitian.

Penelitian ini juga menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara. Wawancara ditujukan untuk memperkuat argumen dan melengkapi data-data sebelumnya. Wawancara yang dilakukan bersifat semi terstruktur, dimana untuk mengumpulkan data peneliti melakukan wawancara dengan lebih

terbuka yang ditujukan untuk mendapatkan ide-ide dan argumen dari narasumber (Sugiyono, 2019).

1.8.5 Analisis dan Interpretasi Data

Metode analisis data yang digunakan adalah kongruen, dimana teori dan kasus akan dihubungkan. Metode kongruen merupakan metode dengan merumuskan penelitian dan kemudian dilanjutkan dengan mempertemukan teori dengan kasus yang digunakan dalam penelitian. Setelah itu akan diperoleh kausalitas dari suatu fenomena sosial yang terjadi (Mills dkk, 2010). Metode ini akan menghubungkan keseluruhan unsur yang berkaitan dalam topik penelitian. Dalam penelitian ini, penulis akan merumuskan topik penelitian terkait dengan keterlibatan Rusia dalam konflik internal di Kazakhstan, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis menggunakan teori konstruktivis berbasis identitas.

1.9 Sistematika Penulisan

Penelitian ini akan terbagi menjadi empat bab. Bab 1 adalah pendahuluan yang merupakan desain dari penelitian. Bab ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan, manfaat, kerangka teori, operasionalisasi konsep, argumen penelitian dan metode penelitian.

Bab 2 adalah uraian terkait proses konstruksi identitas Kazakhstan. Dalam bab ini akan diuraikan terkait sejarah, bahasa, etnis, agama dan identitas lain dari negara Kazakhstan. Selanjutnya pada bab ini akan dilakukan identifikasi terkait identitas kolektif yang terbentuk antara Kazakhstan dan Rusia.

Bab 3 merupakan analisis faktor yang mempengaruhi kebijakan Kazakhstan. Untuk lebih jelas bab ini akan melihat dan menganalisis pengaruh

identitas kolektif yang terbentuk antara Kazakhstan dan Rusia dalam mengarahkan kebijakan Kazakhstan mengundang Rusia untuk terlibat dalam konflik internal negaranya.

Bab 4 adalah penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Pada bab ini akan dikemukakan hasil penelitian, apakah konsisten atau tidak terhadap argumen awal peneliti. Bab ini juga akan berisi kekurangan-kekurangan penelitian dan rekomendasi untuk penelitian-penelitian selanjutnya.